

**Strategi Adaptif NGO saat Pandemi COVID 19  
(Studi Kasus Pelayanan Sosial Mitra Wacana  
Women Resource Centre)**

**Nahdiyana Fitri Hidayah**

Pekerjaan Sosial, *Interdisciplinary Islamic Studies*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [hallonahdiyana18@gmail.com](mailto:hallonahdiyana18@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

Mitra Wacana WRC merupakan organisasi yang bergerak di isu perempuan dan anak untuk memperjuangkan keadilan gender, dan lembaga yang bergerak lebih kepada level mezzo dan makro. Mitra Wacana memiliki arti suatu organisasi yang bisa menjadi teman berpikir kritis terhadap perempuan dan anak. Pada kondisi pandemi ini, Mitra Wacana WRC sedang berupaya beradaptasi dengan meminimalisir kontak fisik. Pengelola maupun para anggota lembaga menyepakati untuk melakukan aktivitas dan koordinasi berbasis online, seperti *routine meeting* yang biasa dilakukan dalam pertemuan fisik, kini dilakukan dengan memanfaatkan media online seperti Whatsapp grup. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Praktikan melakukan proses wawancara dalam rangka mendapatkan pemahaman dan pengungkapan yang sedang dihadapi lembaga. Studi ini meneliti tentang bagaimana strategi adaptif NGO disaat terjadi pandemi COVID 19, studi kasus dalam pelayanan sosial Mitra Wacana WRC. Dampak yang dirasakan akibat pandemi ini setiap anggota komunitas maupun penerima manfaat (klien) mulai membiasakan memanfaatkan teknologi yang ada dalam mendapatkan informasi maupun berkoordinasi. Karena pada dasarnya Mitra Wacana tetap melakukan kegiatan seperti biasanya ditengah situasi virus corona melanda.

**Kata Kunci:** Pelayanan Sosial, Mitra Wacana WRC, Pandemi

**ABSTRACT**

*Mitra Wacana WRC is an organization engaged in the issue of women and children to fight for gender justice, and an institution that works more at the mezzo and macro levels. Mitra Wacana means an organization that can be critical thinking partners of women and children. In this pandemic condition, Mitra Wacana WRC is trying to adapt by minimizing physical contact. Managers and institutional members have agreed to carry out online-based activities and coordination, such as routine meetings that are usually carried out in physical meetings, which are now carried out by utilizing online media such as WhatsApp groups. The research method used is qualitative descriptive. Praktikan conduct the interview process in order to gain understanding and disclosure that is being faced by the institution. This study examines the adaptive strategies of NGOs in the event of the COVID 19 pandemic, a case study in the social services of Mitra Wacana WRC. The impact felt due to this pandemic every member of the community and beneficiaries (clients) began to get used to utilizing existing technology in obtaining information and*

*coordinating. Because basically Mitra Wacana continues to carry out its usual activities in the midst of the coronavirus situation.*

**Keywords:** *Social Services, Mitra Wacana WRC, Pandemic.*

---

## **A. Pendahuluan**

Pada Desember 2019, masalah pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan permasalahan ini masih belum dikenal, tetapi permasalahan awal berhubungan dengan pasar ikan di Wuhan. Semenjak 31 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020 permasalahan ini bertambah pesat, diisyrati dengan dilaporkannya sebanyak 44 permasalahan. Satu bulan berlalu, penyakit ini sudah menyebar di bermacam provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, serta Korea Selatan [1].

Setahun berlalu, wabah pandemi COVID 19 di Indonesia hingga kini masih sangat terasa, setiap hari kasus terkonfirmasi positif COVID terus meningkat. Menurut Satuan Tugas Penanganan COVID 19, data telah menunjukkan bahwa kasus konfirmasi positif COVID 19 pada 17 Januari 2021 sebanyak 907.929 kasus [2]. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan selama covid-19 masuk ke Indonesia, sepertihalnya program PSBB. PSBB itu sendiri adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan belajar di rumah [3]. Adapun kebijakan yang digalakkan oleh pemerintah tersebut, sudah memberi dampak dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, sepertihalnya sekolah dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi wajib

melaksanakan pembelajaran tatap muka via daring, dengan mewabahnya virus mematikan berasal dari Wuhan di Indonesia, berakibat besar pada berbagai sektor, salah satunya pada sektor pendidikan. Aktivitas belajar mengajar di sekolah terpaksa diberhentikan guna meminimalisir penyebaran COVID 19 [4]. Pasar tradisional maupun tempat perbelanjaan modern diwajibkan tutup hingga waktu yang belum bisa ditentukan hingga kasus COVID 19 mereda. Peristiwa ini selaras dengan arahan dari Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor yang diarahkan pada tanggal 15 Maret 2020. Presiden mengimbau bahwa meminimalisir penyebaran virus corona varian baru (SARS- Cov- 2) hal yang mengakibatkan tertularnya COVID 19, masyarakat dihimbau untuk bekerja, belajar, hingga beribadah dari rumah salah satunya dengan membuat sistem bekerja dari rumah [5]. Setelah merebaknya COVID 19, dan berlakunya skema bekerja dari rumah, lalu lintas kota jadi berganti. Awal, jumlah perjalanan menjadi menurun dan waktu puncak juga dapat berubah karena salah satu karakteristik bekerja dari rumah merupakan keluasaan waktu kerja. Kedua, jumlah pemakai kendaraan individu dapat meningkat jika protokol COVID 19 tidak dijalankan secara disiplin pada transportasi publik. Ketiga, dalam jangka panjang perebakan kota (*urban sprawl*) dapat marak kembali sebab aspek jarak

rumah-kantor menjadi kurang berarti lagi[6], tak terkecuali pada pelayanan masyarakat di lembaga tertentu. Salah satunya lembaga NGO (*Non Government Organization*) Mitra Wacana WRC.

Bekerja selama pandemi seperti saat ini tentu saja memberikan perubahan dalam kultur kerja yang membuat pekerja perlu melakukan penyesuaian.[7]. Untuk mengatasi pandemi mendorong orang untuk menerapkan jarak sosial guna mengurangi interaksi antara orang-orang yang pada akhirnya dapat mengurangi kemungkinan penyebaran kasus baru. Namun, hal itu telah mempengaruhi kesehatan fisik, mental, sosial dan spiritual masyarakat secara keseluruhan [8]. Sesuai keterangan yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik dimasa COVID 19 dengan menerapkan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah, akan berdampak pada akses pelayanan masyarakat. Kebijakan tersebut akan mengurangi pertemuan koordinasi serta aktivitas layanan lembaga kepada masyarakat. Pada masa seperti ini, awalnya dilakukan secara langsung dan tatap muka, agar tidak menimbulkan kerumunan massa, maka harus beralih pada via online dengan fasilitas teknologi yang mendukung. Hal ini, seharusnya menjadi momentum positif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah DIY memberlakukan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Pada 7 Januari 2021 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat pasien terkonfirmasi positif COVID 19 dalam waktu 24 Jam meningkat hingga 335 orang, sehingga

total terkonfirmasi COVID 19 menjadi 13.967 permasalahan. Adapun total suspek COVID 19 di DIY sudah mencapai 24.163 orang [9].

Kebijakan tersebut sangat berdampak pada kegiatan dan koordinasi yang dilakukan pada lembaga swadaya yang bergerak pada bidang pelayanan sosial khususnya pada ranah perempuan. Riset ini dilakukan di Mitra Wacana WRC (*Women Resource Centre*), Lembaga Swadaya Mitra Wacana ialah salah satu lembaga yang berlokasi di Yogyakarta. Mitra Wacana WRC adalah organisasi yang bergerak di isu perempuan dan anak, guna memperjuangkan keadilan gender. Mitra Wacana merupakan sesuatu organisasi yang dapat menjadi sahabat berpikir kritis terhadap perempuan dan anak. Frasa WRC (*Women Resource Centre*) bermakna Mitra Wacana sebagai pusat pengembangan perempuan yang kokoh dan berdaya dalam kehidupan. Atas dasar penjabaran diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi adaptif NGO Mitra Wacana saat pandemi COVID 19 seperti kegiatan serta koordinasi pelayanan lembaga dalam melayani para perempuan atau anggota binaannya ditengah pembatasan sosial yang digalakkan oleh pemerintah.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan permasalahan sesuai dengan kondisi di lapangan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diterapkan lembaga Mitra Wacana di masa pandemi COVID19. Metode deskriptif digunakan untuk

memberikan gambaran yang jelas pada persoalan pandemic COVID 19 dan Pelayanan sosial mitra wacana yang diaktualisasikan pada masa sekarang

Teknik pengumpulan data penelitian melalui *interview* dan pengumpulan data melalui web resmi Mitra Wacana. Peneliti melakukan interview dengan Pak Sugeng selaku koordinator divisi pendidikan publik. Pak Sugeng selaku perwakilan Mitra Wacana yang dilibatkan dalam proses interview karena ia yang merupakan salah satu penggagas program-program mitra wacana sebelum maupun disaat pandemi COVID 19. Peneliti melakukan *interview* dengan informan tanpa menggunakan *interview guide*, sehingga *interview* yang dilakukan bersifat bebas.

### C. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Zubaedi menerangkan bahwa, pengembangan masyarakat merupakan upaya pengembangan suatu keadaan masyarakat yang berkepanjangan, aktif berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan menghargai terhadap sesama. Kedudukan serta upaya para pekerja pada zona kemasyarakatan merupakan membagikan sarana kepada masyarakat agar terciptanya proses keadilan sosial serta saling menghargai melalui bermacam program pembangunan secara luas serta saling menghubungkan seluruh elemen masyarakat pada masing-masing strukturnya. Pengembangan warga mempraktikkan nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, peluang, opsi, partisipasi, saling menguntungkan, timbal balik dan pendidikan terus

menerus. Inti dari proses pengembangan warga merupakan mendidik, memberikan peluang pada tiap anggota masyarakat dalam berpartisipasi dalam mengerjakan suatu dengan membagikan dorongan, kekuatan ataupun fasilitas yang dibutuhkan guna memberdayakan mereka [10].

Zubaedi menyatakan pengembangan masyarakat dilandasi sebuah cita-cita bahwa masyarakat harus mengambil peran dan tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, berusaha memperoleh kesejahteraan, dapat menangani sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun *supportive communities*, yaitu sebuah struktur masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil serta adanya interaksi sosial, partisipasi, dan upaya saling mendorong antar satu dengan yang lain.

Permendagri RI No 7 Tahun 2007 pasal 1, ayat (8) tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan ber masyarakat, berbangsa serta bernegara (Pasal 1, ayat 8) [11].

Tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun suatu struktur masyarakat yang didalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis saat terjadi pengambilan keputusan. Upaya ini menuntut proses pembentukan

yang memungkinkan sebuah masyarakat memiliki akses pada sumber daya, sanggup mengendalikan sumberdaya dan struktur kekuasaan masyarakat [12].

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan, serta keahlian masyarakat dalam rangka meningkatkan keahlian masyarakat miskin dalam memastikan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya [13]. Pemberdayaan merupakan proses dan langkah dalam mengupayakan unsur-unsur keberdayaan masyarakat, sehingga mereka mampu meningkatkan harkat, martabat serta keluar dari ketergantungan yang mengkondisikan mereka terperangkap dalam kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan istilah lain memandirikan masyarakat [14].

Prinsip-prinsip dalam Pengembangan Masyarakat menurut Zubaedi adalah sebagai berikut.

1. Berkelanjutan. Pengembangan masyarakat adalah bagian dari upaya membangun tatanan sosial, ekonomi, politik baru dimana strukturnya secara berkelanjutan. Setiap kegiatan pengembangan masyarakat harus berjalan sesuai kerangka berkelanjutan. Jika tidak, maka yang terjadi tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. Keistimewaan dari prinsip berkelanjutan dapat membangun struktur, organisasi, bisnis, serta industri yang dapat tumbuh dan berkembang dalam berbagai tantangan.
2. Kemandirian. Masyarakat seharusnya mencoba memanfaatkan kemampuan secara mandiri terhadap sumber daya yang dimiliki seperti: keuangan, teknis,

alam dan manusia daripada menggantungkan diri kepada bantuan dari luar. Melalui program pengembangan masyarakat, setidaknya masyarakat mampu mengidentifikasi serta memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat semaksimal mungkin.

3. Partisipasi. Pembangunan masyarakat harus memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan setiap individu dapat terlibat aktif dan berperan dalam proses berkegiatan di masyarakat. Banyaknya anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif, maka akan lebih banyak cita-cita yang terealisasikan. Hal ini tidak menekankan bahwa setiap orang harus berpartisipasi dengan cara yang sama. Setiap masyarakat memiliki keterampilan, keinginan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Kerja kemasyarakatan yang baik akan memberikan rangkaian kegiatan partisipatori yang seluas-luasnya.

#### **D. Teori *Community Development* menurut Jim Ife**

Jim Ife menyatakan bahwa pada konsep pemberdayaan, memiliki dua konsep yang saling berkaitan, yakni: konsep *Power* (daya) dan konsep *Disadvantaged* (ketimpangan). Usaha pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi pemahaman, bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Jim Ife berhasil mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat guna memberdayakan sebuah masyarakat itu sendiri [15], yaitu:

1. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi dan kesempatan untuk lebih baik.
2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
3. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi dengan mengembangkan kapasitas yang dimiliki masyarakat untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya politik.
4. Kekuatan kelembagaan dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintah, media dan sebagainya.
5. Kekuatan sumber daya ekonomi dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.

Berdasarkan kajian yang telah dijabarkan diatas, maka diperlukan adanya tinjauan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat. Hal ini diperlukan sebagai bahan rujukan penelitian. Selain itu diperlukan sebagai bahan pengembangan penelitian yang sudah ada.

Setelah penulis melakukan penelusuran kajian literatur, ada beberapa karya tulis yang terkait dalam konteks pelayanan sosial. *Pertama*, Menstimulasi Praktik Gereja Rumah di tengah Pandemi

Covid-19 disusun oleh Fransiskus Irwan Widjaja, Candra Gunawan Marisi, T. Mangiring Tua Togatorop dan Handreas Hartono. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam situasi pandemi covid-19 penggunaan teknologi digital dalam melakukan ibadah bukanlah hal yang menghilangkan esensi ibadah, karena sejatinya gereja merupakan persekutuan, persekutuan dibangun atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Dalam konteks era digital saat ini tercipta melalui ibadah digital sebagai bentuk kebebasan dalam mengekspresikan bentuk pelayanan yang ingin dibangun dan disajikan bagi masyarakat digital saat ini. Ibadah *live streaming* yang dapat dinikmati oleh siapapun yang mau dan tertarik untuk menikmatinya tanpa harus dirinya seorang Kristen. Sebagai kesimpulannya, gereja harus melihat bahwa peristiwa pandemic ini sebagai kesempatan untuk menstimulasi bangkitnya gereja rumah melalui kebijakan pembatasan sosial dari pemerintah terkait ibadah keagamaan[16].

Kedua, Standar Pelayanan Publik di Era Transisi New Normal disusun oleh Abd Rochman dan Dewi Citra Larasati. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa standar pelayanan public di era transisi new normal dalam lingkup kajian Bapenda Kota Malang telah mengalami relaksasi untuk menyesuaikan dengan protocol kesehatan yang telah dilakukan pemerintah. Yaitu 1) Prosedur Pelayanan dan Jangka Waktu Pelayanan, dilakukan dengan mengurangi pegawai yang bertugas di loket pelayanan dengan mengalihkan pelayanan pelaporan serta konsultasi pajak dengan *system online*. 2) Dalam mengakses pelayanan *online* masyarakat tidak dipungut biaya apapun.

3) berbagai jenis pelayanan yang disediakan sudah dijabarkan dalam buku atau masyarakat bisa langsung menanyakan keluhan atau pertanyaan kepada petugas di ruang tunggu. 4) Sarana dan Prasarana kesiapan pelayanan publik sesuai dengan aturan kesehatan yang telah ditetapkan. 5) Petugas bagian loket dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman kerja dalam melayani wajib pajak. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Bapenda adalah kesadaran wajib pajak untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada [17].

Ketiga, Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembelajaran Berbasis Daring ditengah Pandemi Corona Virus Disease 2019, disusun oleh Ahmad Syamsir, Mohamad Ichsana Nur, Idah Wahidah dan Siti Alia. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pembelajaran secara daring (*e-learning*) sebagai bagian dari penerapan *e-government* dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pembelajaran dan menjadi media yang relevan untuk menciptakan kualitas pelayanan optimal kepada mahasiswa. Hal tersebut kemudian bisa menjadi pijakan bagi setiap Perguruan Tinggi yang ingin berhasil dalam menyelenggarakan *e-learning* ditengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, dengan tetap memperhatikan sejumlah factor yang mendukungnya. Adapun faktor-faktor yang mendukungnya adalah sebagai berikut, 1) system layanan yang inovatif dan kolaboratif. 2) Sarana dan prasarana yang lengkap. 3) Ketersediaan anggaran yang memadai 4) Kebaruan teknologi yang digunakan 5) Inovasi pembelajaran yang menarik 6) tenaga pendidik yang kompeten dan berkapasitas 7) terbukanya

ruang interaksi langsung dan partisipatif antara tenaga pendidik dan eserta didik. Namun demikian, Ahmad Syamsir dan kawan-kawan melihat hal yang paling krusial dari kesuksesan penerapan *e-learning* ini ditentukan oleh pelaksanaan peran setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Sehingga hubungan diantara mereka, yaitu lembaga, tenaga pendidik, dan peserta didik bisa saling mendukung satu sama lain. Inilah esensi sebenarnya dari konsep *e-government*, yaitu dapat mengkoneksikan interaksi antara para pemangku kepentingan yang lebih efektif dan efisien, dengan tetap berprinsip pada pemberian pelayanan public yang berkualitas [18].

Keempat, Manajemen Pelayanan KTP-Elektronik Era Pandemi COVID 19, penelitian ini disusun oleh Cahyo Sasmito, Dewi Citra Larasati, dan Arnaningsih May Dema. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Manajemen dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang di masa pandemic COVID-19 adalah sebagaimana berikut, 1) Prosedur Pelayanan, adanya kemudahan persyaratan dalam mengurus KTP-el dengan datang membawa Kartu Keluarga (KK), menjadikan mobil keliling dan mengurangi jam pelayanan serta membatasi pemohon dengan 60 pemohon setiap harinya. 2) Waktu penyelesaian, dengan adanya pembatasan 60 pemohon, penyelesaian KTP-El bisa sesuai dengan SOP yaitu selama 4 hari. 3) Pelayanan tanpa dipungut biaya apapun alias gratis. 4) Sarana Prasarana/Fasilitas sudah sangat memadai dalam hal pelayanan dan sesuai standart protokol kesehatan. 5)

Kompetensi Pelaksana, pendidikan minimal SMA dan dibekali dengan pelatihan rutin mengenai IT. 6) Jaminan Pelayanan, ini adalah kepastian sesuai standart pelayanan dan kepastian bebas korupsi karena Dispendukcapil termasuk dalam Zona Integritas. 7) Evaluasi Kinerja, dilakukan setiap waktu karena dimasa pandemi banyak kebijakan yang berubah dengan cepat. Kemudian factor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Pelayanan KTP-El di Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang di Era Pandemi, meliputi: 1) Faktor Pendukung: Terpenuhinya sarana dan prasarana jumlah pegawai, 2) Faktor Penghambat: Banyaknya kebijakan-kebijakan baru, dan adanya mindset masyarakat dalam menerima perubahan masih kurang baik[19].

Berdasarkan kajian literature diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial di era pandemi secara garis besar dilakukan dengan sistem online sebagai cara interkasi tidak langsung antara pemangku kepentingan disebuah lembaga dengan masyarakat.

#### **E. Hasil dan Pembahasan Pelayanan Mitra Wacana dalam Kajian Lembaga dalam Memfasilitasi Klien disaat terjadi Pandemi COVID 19**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, pada situasi pandemic seperti sekarang ini, pelayanan Mitra Wacana WRC sedang berupaya beradaptasi dengan meminimalisir kontak fisik. Pengelola maupun para anggota lembaga menyepakati untuk melakukan aktivitas dan koordinasi berbasis online, seperti *routine meeting* yang biasa dilakukan dalam pertemuan fisik, kini

dilakukan dengan memanfaatkan media online seperti Whatsapp grup. Karena sejauh ini, whatsapp merupakan aplikasi yang populer dan biasa digunakan dibandingkan aplikasi yang lain. Kegiatan tetap berjalan seperti biasa, namun ada penambahan materi-materi seperti pembahasan mengenai pencegahan covid 19. Dengan mendorong komunitas-komunitas binaan Mitra Wacana dengan melakukan aktivitas-aktivitas seperti talkshow yang saat ini Mitra Wacana lakukan melalui live streaming Facebook, maupun kanal Youtube channel, hal ini bisa menjadi salah satu pembelajaran tidak hanya pada komunitas dampingan namun juga bisa diakses masyarakat secara luas.

Dampak yang dirasakan akibat pandemi ini setiap anggota komunitas maupun penerima manfaat (klien) mulai membiasakan memanfaatkan teknologi yang ada dalam mendapatkan informasi maupun berkoordinasi. Karena pada dasarnya Mitra Wacana tetap melakukan kegiatan seperti biasanya ditengah situasi virus corona melanda. Mitra Wacana melakukan koordinasi dengan lembaga *funding* dari Jerman dengan mengubah alokasi kegiatan untuk merespon virus corona ini.

Lembaga *funding* dari Jerman ini memberikan bantuan ke lembaga Mitra Wacana berupa hazmat atau Alat Pelindung Diri (APD), *handsanitizer*, botol pencuci tangan dan alat pengukur suhu. Mitra Wacana mendistribusikan ke 9 desa yang ada di Kulon Progo. Jadi ada mekanisme dalam menangani respon virus corona ini dan bekerja sama dengan komunitas binaan dengan aparaturnya.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu dijelaskan bahwa Mitra Wacana merupakan lembaga yang bergerak lebih kepada level mezzo dan makro. Mitra Wacana melakukan asesmen dengan pengumpulan data, pemetaan komunitas, pemetaan geografis, pihak-pihak lain yang terlibat, disitulah sebagai penopang, pendukung, dan pihak-pihak yang akan diadvokasi. Pada asesmen awal, Mitra Wacana melakukan mengumpulkan kelompok ibu-ibu yang ada di Desa tepatnya di Kulon Progo, Mitra Wacana mengumpulkan ibu-ibu yang terlibat aktif dalam kegiatan dan mempunyai potensi. Kemudian lembaga melakukan analisis sosial. Setelah dikumpulkan ternyata banyak ibu-ibu mantan pekerja migran luar negeri di desa tersebut. Mereka berkumpul dan saling bercerita mengenai problematika buruh migran. Disitulah terjadi proses bersama dengan memetakan problem apa yang terjadi. Akhirnya terbentuklah organisasi binaan yang bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A).

Format pendampingan yang dilakukan Mitra Wacana dilakukan pada FGD (*Forum Group Discussion*) dan akhirnya mengelompokkan bahwa mantan pekerja migran seringkali mendapatkan perilaku kekerasan fisik maupun perdagangan manusia. Hal ini disebut proses partisipatif, dan menjadi penting dalam proses pemberdayaan dan pendampingan. Dari proses FGD yang berlangsung ini, ada bentuk kesadaran kolektif untuk membentuk sebuah komunitas dimana untuk tempat advokasi, wadah sharing untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa. Maka dibutuhkannya komunitas sebagai wadah

“senasib sepenanggungan” untuk beramasa sama belajar dan saling menguatkan, saling berinteraksi dan berbagi informasi.

Setiap komunitas binaan Mitra Wacana dalam melakukan programnya terkadang berbeda fokusnya di wilayah masing-masing. Mitra Wacana diawal menemukan masalah mantan pekerja migran menjadi *pioneer* di desa mereka, setelahnya adalah proses pendampingan kepada organisasi maupun komunitas binaannya. Seperti halnya membahas isu-isu gender, kesehatan reproduksi, pencegahan KDRT hingga lain sebagainya.

Dengan adanya P3A pihak desa merasakan kebermanfaatannya pada komunitas ini, dimana P3A mempunyai peran penting dalam merespon virus corona dikalangan ibu-ibu. Hingga akhirnya desa memberikan kepercayaan penuh kepada komunitas ini hingga mendanai P3A untuk melakukan sosialisasi isu-isu penting perihal isu gender, kespro hingga masalah virus corona kepada masyarakat dengan target sasaran ibu-ibu rumah tangga. Hal ini memberikan dampak positif untuk langkah-langkah advokasi advokasi kedepan.

Sistem pemantauan dan pendampingan Mitra Wacana kepada komunitas binaan seperti P3A ini adalah dengan sistem koordinasi. Pada setiap 3 desa dalam 1 kecamatan ada 2 *CO (Community Organizer)* yang mendampingi mereka. Jadi pendampingan serta pemantauan dilakukan dengan perwakilan masing-masing tanggungjawab CO kemudian di diskusikan pada pihak lembaga dengan media whatsapp. Dengan proses pemantauan yang masih berlangsung

menandakan bahwa lembaga dalam pelayanannya kepada komunitas binaan tidak berhenti total. Mitra Wacana masih terus menyesuaikan dengan situasi saat ini.

Selama masa pandemi COVID 19 ini, tidak ada pengurangan kegiatan, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Mitra Wacana melakukan kegiatannya dalam pendampingan maupun pemantauan dengan whatsapp meskipun dibutuhkan penyesuaian. Bahkan saat ini ada penambahan kegiatan seperti di P3A seperti membuat masker dan dibagikan kepada yang membutuhkan.

#### **Aplikasi Teori *Community Development***

Upaya menumbuhkan partisipasi, peran serta keaktifan masyarakat, dalam hal pendampingan yang dilakukan Mitra adalah sebagai berikut. Mitra Wacana berusaha menggugah kesadaran masyarakat terhadap mantan pekerja migran, mereka akhirnya bersedia untuk mengungkapkan permasalahan setelah ada sosialisasi mengenai tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Adanya sebuah realitas yang dihadapi setiap individu mantan pekerja migran ini memerlukan tindakan konkret dalam upaya mencegahnya terulangnya kasus-kasus serupa.

Partisipasi yang dibangun melalui program yang dibangun berjalan secara bertahap. Dimulai dengan saling *sharing* secara interaktif hingga tumbuhnya mobilitas sendiri (*self-mobilization*). Partisipasi interaktif yang dilakukan masyarakat binaan Mitra Wacana di beberapa desa di Kulon Progo dimana ide dalam berbagai kegiatan dimulai dari

perencanaan masalah seperti tindakan kekerasan, kemudian diadakannya pelaksanaan sosialisasi tindak kekerasan pada pekerja migran dalam upaya penyadaran masyarakat, kemudian yang terakhir adalah evaluasi program, dimana kini organisasi P3A telah mendapatkan pengakuan dari desa-desa setempat, dan masih dibantu serta pendampingan dari pihak luar yaitu Mitra Wacana. Sementara, mobilitas yang dimaksud ialah bentuk partisipasi, dimana menurut Zubaedi, masyarakat dapat mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan, pada berbagai tahap secara mandiri dan mobilisasi sumberdaya yang dibutuhkan dari masyarakat sendiri. Pada mobilitas, informan menjelaskan bagaimana P3A menginisiasi dalam melaksanakan kegiatan isu-isu mengenai tindakan kekerasan, isu-isu gender hingga isu-isu mengenai pencegahan penyebaran virus corona, dan berinisiatif membuat masker untuk dibagikan kepada yang membutuhkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan, jika masyarakat sudah mampu secara mandiri berpikir, bersikap, dan mengambil tindakan dengan orientasi jangka panjang, maka dalam hal ini mereka sudah berada di tahap terberdayakan.

#### **F. Penutup Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Mitra Wacana dalam situasi pandemi COVID 19, masih melaksanakan program dan kegiatan seperti biasanya, hanya saja perlu adanya adaptasi dengan meminimalisir kontak dan menggantinya

dengan via online seperti rapat melalui whatsapp.

Situasi pandemi seperti sekarang ini, Mitra Wacana berusaha adaptif atau menyesuaikan diri dengan mendorong komunitas-komunitas binaan untuk melakukan berbagai aktivitas talkshow yang dilakukan Mitra Wacana melalui *fanspage facebook* atau kanal *youtube channel*.

Situasi pandemi virus corona tidak ada dampak signifikan dalam pelayanan, hanya saja setiap anggota maupun komunitas binaan harus beradaptasi dengan membiasakan memanfaatkan teknologi dalam mendapat informasi atau berkoordinasi.

### Saran

Rekomendasi praktikan berikan kepada sistem target pelayanan yaitu pendamping, pihak sekolah dan orang tua klien TT. Rekomendasi tersebut sebagai berikut:

Mitra Wacana agar selalu memberikan pendampingan, pembinaan kepada komunitas binaan secara berkelanjutan.

Dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan kepada masyarakat alangkah baiknya pihak Mitra Wacana perlu melibatkan Pekerja Sosial maupun Dinas Sosial sehingga dapat menjalankan fungsi dan kinerjanya dan meningkatkan kapasitas pelayanan yang sesuai dengan tupoksi pekerjaan sosial dalam melayani klien sesuai dengan tujuan lembaga.

Perlu adanya inovasi yang dilakukan Mitra Wacana dalam menghadirkan kegiatan atau program-program baru, dimana bisa menjadi salah satu pembelajaran tidak hanya komunitas

dampingan namun diterima masyarakat luas.

### G. Daftar Pustaka

- [1] Adityo Susilo, Cleopas Martin Rumende, Coronavirus Disease (2019), Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Universitas Indonesia, Vol. 7 No 1, 2020.* <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>
- [2] COVID19 <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-17-januari-2021>
- [3] Udin Ahidin dkk, COVID 19 dan Work From Home, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), <http://eprints.unpam.ac.id/8679/2/Covid%2019%20dan%20Work%20From%20Home%201%20Full%20Final.pdf>
- [4] Annisa Etika Arum, Endang Susilaningsih. Pembelajaran Daring dan Kajian Dampak Pandemi Covid 19 di Sekolah Dasar di Kecamatan Muncar, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana , Vol 3 No 1 <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/578>
- [5] KEMENKEU 'Bekerja dari rumah (Work From Home) dari Sudut Pandang Unit Kepatuhan Internal'.(2020) Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13014/Bekerja-dari-Rumah-Work-From-Home-Dari-Sudut-Pandang-Unit-Kepatuhan-Internal.html>
- [6] Oswar Mungkasa, Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19, *Jurnal Perencanaan Pembangunan, Vol 4, No 2 (2020) Edisi Khusus COVID 19 – Juni 2020.* <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/119/81>

- [7] Agung Minto Wahyu, Mochammad Sa'id, PRODUKTIVITAS SELAMA WORK FROM HOME: SEBUAH ANALISIS PSIKOLOGI SOSIAL, *Jurnal Kependudukan Indonesia LIPI*, Edisi Khusus Demografi dan COVID 19, Juli 2020, 53-60. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/570/pdf>
- [8] Kritika Poudel dan Pramod Subedi, Impact of COVID-19 pandemic on socioeconomic and mental health aspects in Nepal. *International Journal of Social Psychiatry*, 66(8), 748–755, <file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/578-Article%20Text-1494-1-10-20210216.pdf>
- [9] TIRTO, Aturan PSBB Jogja 11-25 Januari 2021: Jam Operasional hingga WFH, 8 januari 2021. <https://tirto.id/aturan-psbb-jogja-11-25-januari-2021-jam-operasional-hingga-wfh-f8YD>
- [10] Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013.
- [11] Cholisin, Pemberdayaan Masyarakat, Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pengabdian/PEMBERDAYAAN+MASYARAKAT.pdf>
- [12] Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K. Ranga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- [13] Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- [14] Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- [15] Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives – vision, Analisis and Practice*, Melbourne: Longman, 2000.
- [16] Fransiskus Irwan Widjaja, Candra Gunawan Marisi, T. Mangiring Tua Togatorop dan Handreas Hartono, Menstimulasi Praktik Gereja Rumah di tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, KURIOS*, Volume 6 No 1, April 2020 (127-139), [file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/166-609-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/166-609-2-PB%20(1).pdf)
- [17] Abd Rohman dan Dewi Citra Larasati, Standart Pelayanan Publik di Era Transisi, *REFORMASI* Volume 10 Nomor 2 (2020) <file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/1952-5446-1-PB.pdf>
- [18] Ahmad Syamsir, Mohamad Ichšana Nur, Idah Wahidan dan Siti Alia, Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembelajaran Berbasis Daring ditengah Pandemi Corona Virus Disease 2019. UIN Sunan Gunung Jati. [file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/Kualitas%20Pelayanan%20Publik%20Dalam%20Pembelajaran%20Berbasis%20Daring%20di%20Tengah%20Pandemi%20Coronavirus%20Disease%202019%20\(2\).pdf](file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/Kualitas%20Pelayanan%20Publik%20Dalam%20Pembelajaran%20Berbasis%20Daring%20di%20Tengah%20Pandemi%20Coronavirus%20Disease%202019%20(2).pdf)
- [19] Cahyo Sasmito, Dewi Citra Larasati, dan Annaningsih May Dema, Manajemen Pelayanan KTP-Elektronik Era Pandemi COVID 19. <file:///C:/Windows/system32/config/systemprofile/Downloads/2343-6662-1-PB.pdf>